

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Medan

Nova Amelia¹, Selfi Oktarahmadini²,
Anisa Harahap³

¹⁻³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Korespondensi penulis: novaamelia221203@gmail.com

Abstract. Poverty is a complex and multidimensional social issue, encompassing the inability of individuals to meet basic needs as well as access to education, healthcare, and decent employment. In the city of Medan, the challenge of poverty remains significant despite its role as an economic hub in North Sumatra. Various efforts have been made by the Medan City Government through social assistance programs, economic empowerment, and infrastructure improvements; however, challenges such as social inequality, limited job opportunities, and bureaucratic inefficiencies remain major obstacles. Additionally, ineffective coordination between the government, NGOs, and the private sector slows the achievement of poverty alleviation goals. Therefore, a holistic approach that includes improvements in education, healthcare, and private sector involvement in local economic development is needed to address poverty sustainably in Medan.

Keywords: Role Of Government, Poverty, Poverty Alleviation, Medan City.

Abstrak. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan multidimensi, mencakup ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan dasar serta akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Di Kota Medan, tantangan kemiskinan tetap signifikan meskipun kota ini berperan sebagai pusat ekonomi di Sumatera Utara. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan melalui program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan infrastruktur, namun tantangan berupa ketimpangan sosial, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan inefisiensi birokrasi masih menjadi hambatan utama. Selain itu, koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta memperlambat pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mencakup perbaikan pendidikan, kesehatan, serta keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi lokal diperlukan untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan di Medan.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Kota Medan.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan di Kota Medan bukan sekadar masalah kekurangan materi, tetapi juga soal akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Meskipun Medan merupakan pusat ekonomi, kemiskinan masih menjadi masalah serius, terutama di daerah marjinal. Pemerintah Kota Medan telah berupaya keras mengatasi kemiskinan melalui berbagai program. Namun, kemiskinan di kota ini sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ketimpangan sosial dan lingkungan. Kemiskinan di Kota Medan merupakan permasalahan multidimensi yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Selain masalah ekonomi, faktor sosial, pendidikan, dan lingkungan juga berperan penting dalam memperparah kondisi kemiskinan.

Salah satu inisiatif pemerintah adalah melalui program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat diajak untuk terlibat aktif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan tunai, tetapi juga mendorong pengembangan keterampilan dan kapasitas masyarakat agar mereka mampu mandiri secara ekonomi. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, dengan harapan dapat memutus siklus kemiskinan antar-generasi. Di sisi lain, kebijakan ekonomi makro yang dijalankan pemerintah juga memiliki dampak besar terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Medan. Kebijakan fiskal, seperti alokasi anggaran untuk program jaminan sosial dan subsidi bagi masyarakat miskin, berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, juga diharapkan dapat membuka akses lebih luas bagi masyarakat pedesaan dan daerah terpencil untuk terhubung dengan pusat-pusat ekonomi, sehingga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Namun, meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta. Selain itu, persoalan korupsi dan inefisiensi birokrasi sering kali menghambat implementasi program yang seharusnya langsung menysasar kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus berinovasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan serta program yang dijalankan. Selain mengandalkan program bantuan sosial, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengatasi akar masalah kemiskinan di Medan. Ini termasuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi lokal. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, kemiskinan di Medan dapat diatasi secara berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan (Zai, E., & Silviani, I. (2022).

2. LANDASAN TEORI

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan di Medan

Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang membutuhkan solusi komprehensif. Pemerintah, sebagai aktor utama, memiliki tanggung jawab besar dalam merancang kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Medan. Tinjauan pustaka ini akan menganalisis berbagai strategi yang telah dan sedang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di kota tersebut. Kebijakan pemerintah

menjadi kunci dalam upaya mengatasi kemiskinan. Tinjauan pustaka ini akan mengkaji berbagai kebijakan yang telah diterapkan di Kota Medan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Panjaitan, K. S., Khairunisah, K., & Jannah, N. (2023).

1. Teori Kemiskinan

Menurut teori kemiskinan struktural, kemiskinan terjadi karena adanya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan (Todaro, 2015). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mampu memperbaiki distribusi tersebut melalui program-program sosial dan ekonomi.

2. Kebijakan Sosial Pemerintah

Berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah di tingkat nasional dan daerah menunjukkan peran signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan. Menurut Bappenas (2020), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah beberapa contoh kebijakan nasional yang juga diterapkan di Medan. Program-program ini dirancang untuk memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Medan memiliki beberapa program penanggulangan kemiskinan, seperti pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang didukung oleh bantuan modal usaha serta pelatihan keterampilan bagi warga kurang mampu (Dinas Sosial Kota Medan, 2021).

3. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi

Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi sangat penting untuk mengatasi kemiskinan. Pembangunan infrastruktur di Medan, seperti proyek perbaikan jalan dan akses transportasi, memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal dengan meningkatkan akses pasar bagi pengusaha kecil dan memperluas kesempatan kerja (Kementerian PUPR, 2020). Selain itu, pemerintah juga mendorong investasi di sektor industri dan pariwisata yang diyakini dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi tingkat kemiskinan. (Arifah, W. A. D., Kurniawan, D., & Yusro, M. (2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang keterkaitan Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Medan. Berbagai sumber data yang digunakan antara lain penelitian terdahulu, artikel ilmiah, google scholar, publish or perish

serta website-website terpercaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kota Medan, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang mendukung mengatasi kemiskinan guna meningkatkan pendapatan dan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Medan, seperti banyak daerah lain, telah menjalankan sejumlah program untuk mengurangi kemiskinan, termasuk bantuan sosial dan peningkatan keterampilan. Meskipun demikian, pelaksanaan program rumah susun untuk masyarakat kurang mampu masih belum optimal. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 telah berhasil mengatasi masalah ini, khususnya dalam hal penyediaan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Intinya, penelitian ini akan fokus pada bagaimana aturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Medan diterapkan, terutama dalam konteks penyediaan rumah susun bagi masyarakat miskin.

Gambaran Perekonomian Kota Medan

Krisis ekonomi 1997 memberikan pukulan telak bagi perekonomian Indonesia, termasuk Kota Medan. Pertumbuhan ekonomi Kota Medan sempat anjlok tajam hingga 18,11%. Namun, berkat upaya pemulihan dan dukungan kebijakan moneter, ekonomi Medan mulai bangkit pada tahun 2001. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin di kota ini terus meningkat akibat dampak jangka panjang krisis. Kota Medan mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan akibat krisis 1997. Setelah penurunan drastis, ekonomi kota ini berhasil tumbuh kembali pada tahun 2001. Meskipun pertumbuhan ekonomi membaik, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan serius. Jumlah penduduk miskin di Kota Medan terus meningkat akibat krisis ekonomi 1997. Meskipun pertumbuhan ekonomi telah pulih, masalah kemiskinan masih menjadi persoalan yang kompleks dan membutuhkan penanganan serius.

Tabel 1
Jumlah Penduduk, Penduduk Miskin Dan Persen Penduduk
Kotamedan Tahun 2000 – 2010

Tahun	Penduduk miskin (juta jiwa)	%sen Penduduk Miskin (jiwa)
2000	19.054,59	6,38
2001	19.260,52	7,25
2002	19.630,86	7,12
2003	19.930,61	7,25
2004	20.061,42	7,13
2005	20.361,85	6,93
2006	20.672,93	7,77
2007	20.831,56	7,17
2008	21.021,05	6,63
2009	21.210,53	9,58
2010	21.093,39	9,84

Sumber: Badan Pusat Statistik

5. DESKRIPTIF VARIABEL

Gambaran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Medan pada periode 2004-2006 sangat menggembirakan, dengan rata-rata kenaikan lebih dari 5% per tahun. Kestabilan pertumbuhan ini menunjukkan kondisi ekonomi yang semakin kuat dan didukung oleh faktor-faktor fundamental yang terus membaik, meskipun sempat terjadi kenaikan harga BBM pada tahun 2005. Pertumbuhan yang tinggi ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, namun tantangan ke depan tetap ada untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut (Daulay, S. K. (2024).).

Gambaran Pendapatan Perkapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat jika tidak diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata. Seperti yang dikemukakan oleh Todaro, penting untuk memperhatikan siapa yang menikmati keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Jika hanya segelintir orang kaya yang mendapatkan manfaat, maka kesenjangan sosial akan semakin lebar. Kualitas pertumbuhan ekonomi sama pentingnya dengan tingkat pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berarti jika hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Menurut Todaro, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus memperhatikan distribusi pendapatan yang adil. Pertumbuhan ekonomi yang cepat memang penting, namun yang lebih krusial adalah siapa yang menikmati hasil dari pertumbuhan tersebut. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti yang ditekankan oleh Todaro, kualitas pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian utama.

Gambaran Inflasi

Kenaikan harga BBM pada tahun 2005 menjadi pemicu utama lonjakan inflasi di Kota Medan yang mencapai 22,91%. Kenaikan harga BBM ini berdampak pada peningkatan harga barang dan jasa lainnya, seperti makanan, perumahan, dan transportasi. Inflasi di Kota Medan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan pada periode 2004-2006. Puncaknya terjadi pada tahun 2005 dengan angka inflasi mencapai 22,91%, yang sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kenaikan inflasi yang tinggi pada tahun 2005 berdampak pada peningkatan harga berbagai komoditas, terutama bahan makanan dan transportasi. Hal ini tentu saja membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Gambaran Pengangguran

Salah satu masalah utama yang dihadapi Kota Medan pada periode 2006-2008 adalah tingginya tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah pencari kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja, serta perubahan tingkat partisipasi angkatan kerja. Kondisi ini berdampak negatif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. (Abdullah, M.Amin. (2018).

A. Konsep Kemiskinan

Jika diartikan secara harfiah, kemiskinan adalah ketiadaan harta benda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemiskinan setara dengan kefakiran. Kedua kata ini biasanya digunakan bersamaan, fakir miskin, yang merujuk pada orang yang sangat miskin. Bekerja sama dengan Lembaga Penelitian SMERU, Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut: a) Pada dasarnya, kemiskinan didefinisikan sebagai kombinasi antara kekurangan non-materi dan pendekatan finansial. Kurangnya transportasi, layanan kesehatan yang tidak memadai, dan kurangnya pendidikan dianggap sebagai komponen utama kemiskinan b) Ketidadaan aset, seperti rumah, uang tunai, tanah, mesin, emas, kredit, dan sebagainya, dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemiskinan. c) Kebebasan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan rumah, dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak merupakan contoh dari kemiskinan non-material. Berabad-abad yang lalu, bangsa Arab terjat dalam kesenjangan antara si kaya dan si miskin, sehingga mereka berusaha untuk menjelaskan kemiskinan di dalam Al Qur'an. Karena kemiskinan dipandang sebagai bencana, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan hanya dimanfaatkan sebagai orang yang tidak layak dan harus diperlakukan sebagai “budak”. Beberapa di antara mereka bahkan rela mengubur anak-anak mereka karena takut bangkrut. Ketika berbicara tentang konsep kemiskinan, Al-Qur'an sering menggunakan istilah fakir dan miskin. Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang dapat merusak ahlak, cara berpikir, keluarga, dan masyarakat, menurut Qardhawi dalam Nurul Huda. Islam berpendapat bahwa karena kejahatan yang mendasarinya, kemiskinan merupakan tragedi atau musibah yang membutuhkan perlindungan Allah SWT. Seseorang bisa saja lupa kepada Allah SWT dan rasa tanggung jawabnya kepada orang lain akibat kemiskinan yang meluas.

B. Bentuk dan Jenis Kemiskinan Menurut Zakaria Pada Bukunya (2018:26)

Kemiskinan Bisa Dibedakan Menjadi Tiga :

1) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif tidak hanya tentang penghasilan, tetapi juga mengenai perbandingan kualitas hidup seseorang dengan orang lain di lingkungan yang sama. Meskipun seseorang mungkin memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, mereka dapat merasa terpinggirkan jika tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan yang memadai, atau kesempatan kerja yang baik. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam pengalaman hidup dan kesejahteraan. Misalnya, seseorang yang tinggal di daerah perkotaan dengan biaya hidup tinggi mungkin merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar meskipun penghasilannya di atas rata-rata. Oleh karena itu, penting untuk memahami kemiskinan relatif dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas, serta upaya untuk menciptakan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup semua individu, bukan hanya fokus pada angka pendapatan.

2) Kemiskinan Budaya

Kemiskinan kultural sering kali dihapuskan pada pilihan gaya hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin merasa nyaman dengan cara hidup tradisional meskipun ada peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik. Ketidakmampuan atau ketidakberanian untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dapat membuat mereka terjebak dalam siklus kemiskinan. Selain itu, stigma sosial dan tekanan dari komunitas juga dapat memperkuat pilihan tersebut. Untuk mengatasi kemiskinan budaya, penting untuk melibatkan masyarakat dalam dialog dan memberikan pendidikan tentang manfaat perubahan tanpa menghilangkan identitas budaya mereka. Program pemberdayaan yang menghargai tradisi sambil mendorong inovasi dapat menjadi solusi efektif untuk membantu individu dan kelompok keluar dari kemiskinan budaya.

3) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kondisi yang sangat serius dan memerlukan perhatian mendesak dari pemerintah dan organisasi internasional. Seseorang atau kelompok dalam keadaan ini tidak hanya kekurangan uang, tetapi juga tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, air bersih, tempat tinggal yang layak, dan layanan kesehatan. Dampak dari kemiskinan absolut sangat luas; anak-anak yang tumbuh dalam kondisi ini berisiko tinggi mengalami malnutrisi, kurang pendidikan, dan masalah kesehatan jangka panjang. Untuk

mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik, termasuk bantuan program langsung, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan solusi jangka panjang yang dapat mengangkat masyarakat dari kemiskinan absolut dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang.

C. Faktor Penyebab Kemiskinan

Terdapat 3 faktor penyebab kemiskinan (Kuncoro (2018: 269) yaitu:

1. Ketimpangan Distribusi Sumber Daya

Kemiskinan secara makro disebabkan oleh perbedaan pola kepemilikan sumber daya yang menciptakan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Masyarakat miskin sering kali memiliki akses terbatas terhadap sumber daya yang berkualitas, sehingga mereka kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan ini mengakibatkan sebagian besar populasi terjebak dalam kemiskinan.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja dengan keterampilan dan pengetahuan yang minim, yang berdampak pada produktivitas yang rendah dan upah yang kecil. Individu dengan SDM yang rendah sulit bersaing di pasar kerja, sehingga mereka terjebak dalam siklus kemiskinan.

3. Ketidaksamaan Akses dan Modal

Ketidaksamaan akses terhadap modal dan sumber daya juga memperburuk kondisi kemiskinan. Banyak individu mengalami kegelisahan yang membuat mereka tidak memiliki pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup. Keterbatasan ini menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak dapat meraih peluang kerja yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat berpendapatan rendah, guna memutus siklus kemiskinan.

D. Kategori dibawah garis Kemiskinan Bappenas

1. Keterbatasan Akses terhadap Pangan, Pakaian, dan Papan.
2. Hak Milik Tanah dan Alat Produktif yang Terbatas.
3. Rendahnya Kemahiran Membaca dan Menulis.
4. Minimnya Agunan dan Kemakmuran Hidup.
5. Kerentanan dan Keterpurukan di Bidang Ekonomi dan Sosial.
6. Ketidakmampuan atau Daya Tawar yang Rendah.

7. Terbatasnya Akses ke Ilmu Pengetahuan.

indikator kemiskinan (BPS (2008):

1. Luas Lantai Bangunan yang Terbatas.
2. Kualitas Bahan Bangunan yang Rendah.
3. Dinding Rumah yang Tidak Memadai.
4. Fasilitas Sanitasi yang Minim.
5. Penerangan Rumah Tangga yang Kurang.
6. Sumber Air Bersih yang Tidak Memadai.
7. Penggunaan Bahan Bakar Tradisional.
8. Konsumsi Protein yang Rendah.
9. Pembelian Pakaian Baru yang Minim.
10. Keterbatasan Konsumsi Makanan.
11. Tidak Mampu Bayar Biaya Obat.
12. Sumber Pendapatan yang Rendah.
13. Jenjang Pendidikan yang Rendah.
14. Keterbatasan Tabungan dan Investasi.

Dalam Arah Presiden dalam pertemuan tertutup tanggal 4 Maret 2020, ditetapkan target yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024. Upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya penghapusan penghapusan ekstrem kemiskinan meliputi:

1. Rendahnya Akurasi Basis Data : Data yang tidak akurat mengenai kelompok miskin dan rentan menghambat penyaluran bantuan dan program yang tepat sasaran. Tanpa data yang valid, sulit untuk mengidentifikasi individu dan keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
2. Keterbatasan SDM : Di tingkat daerah, terdapat keterbatasan dalam kapasitas SDM penyelenggara program penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan program-program yang ada.
3. Kelembagaan TKPK yang Belum Merata : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di daerah belum terbentuk secara merata dan kuat. Kelembagaan yang lemah dapat menghambat koordinasi antar sektor dan efektivitas program.

4. Standar Layanan dan Prosedur yang Belum Optimal : Banyak program penanggulangan kemiskinan yang belum memiliki standar layanan dan prosedur operasional yang jelas, sehingga pelaksanaannya tidak konsisten di berbagai daerah.
5. Fragmentasi Program Lintas OPD : Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sering kali terfragmentasi antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga mengurangi sinergi dan efektivitas intervensi.

Untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah mengusung tiga strategi utama:

1. Menurunkan Beban Pengeluaran : Untuk meminimalisir beban biaya hidup masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial, subsidi, dan program perlindungan sosial lainnya.
2. Meningkatkan Pendapatan : Upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin meliputi pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan akses terhadap modal usaha.
3. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan : Fokus pada pengentasan daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi menjadi penting untuk memastikan bahwa intervensi dilakukan tepat sasaran.

Rencana implementasi penghapusan kemiskinan ekstrem bagian menjadi tiga tahap:

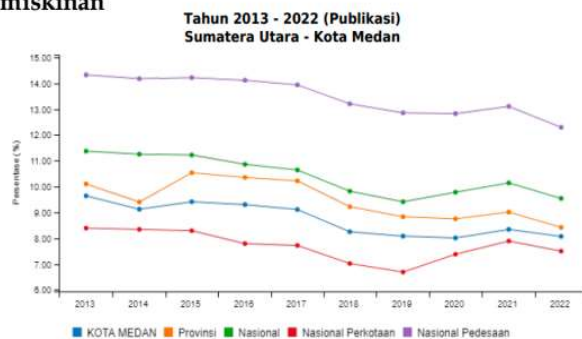
Tahap 1 (2021) : Fokus pada 35 kabupaten sebagai lokasi prioritas untuk intervensi awal. Pada tahap ini, diharapkan dapat dilakukan pengumpulan data yang lebih akurat dan pelaksanaan program secara terintegrasi.

Tahap 2 (2022) : Perluasan prioritas 250 kabupaten/kota untuk meningkatkan jangkauan program penanggulangan kemiskinan. Ini termasuk kabupaten-kabupaten yang sudah menjadi fokus pada tahap sebelumnya.

Tahap 3 (2023-2024) : Perluasan secara bertahap ke 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahap ini, diharapkan seluruh daerah dapat menerapkan kebijakan kolaboratif dan integratif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dengan pendekatan multidimensi dan kolaboratif lintas sektor, diharapkan penurunan kemiskinan ekstrem dapat tercapai dengan efektif dan berkelanjutan.

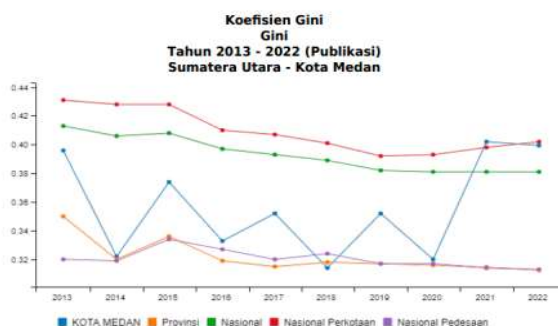
Ukuran Kemiskinan



Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023) (2023)

Jumlah penduduk kurang mampu di Kota Medan pada tahun 2022 tercatat sebesar 8,07% , mengalami penurunan sebesar 0,27% dari 8,34% pada tahun sebelumnya. Meskipun ada penurunan, laju penurunan ini menunjukkan pelambatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Medan telah melaksanakan berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan, termasuk program Universal Health Coverage (UHC) dan bantuan sosial bagi siswa miskin. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Medan berkurang dari sekitar 193.000 menjadi 187.740 . Selain itu, tingkat kemiskinan terbuka juga menurun menjadi 8,89%.

Koefisien Gini

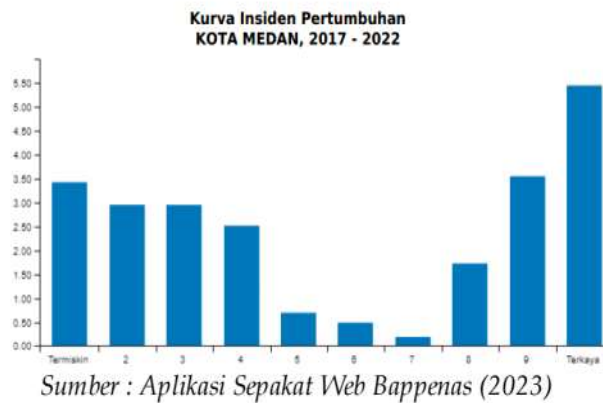


Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

Koefisien Gini Kota Medan pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,40 , menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,40 . Meskipun ada penurunan, laju penurunan ini menunjukkan pelambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Koefisien Gini nasional ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan koefisien Gini nasional, namun lebih rendah dari koefisien Gini khusus untuk daerah perkotaan. Penurunan koefisien Gini mencerminkan kemajuan dalam penanganan masalah ketimpangan pendapatan di Kota Medan. Namun tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan

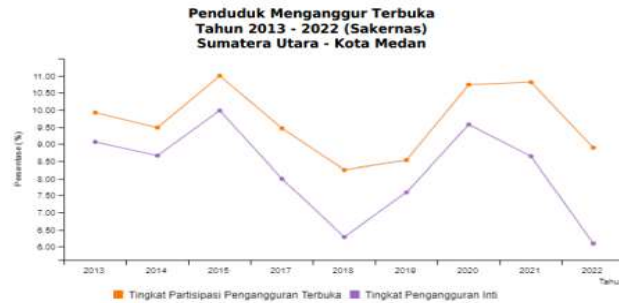
kesejahteraan secara merata. Sebagai daerah yang didominasi oleh populasi perkotaan, Kota Medan perlu terus berupaya mengurangi ketimpangan pendapatan agar dapat mencapai kemakmuran yang cukup baik bagi Setiap warganya. Upaya tersebut mencakup peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penyediaan lapangan kerja yang lebih baik untuk masyarakat.

Kurva Insiden Pertumbuhan



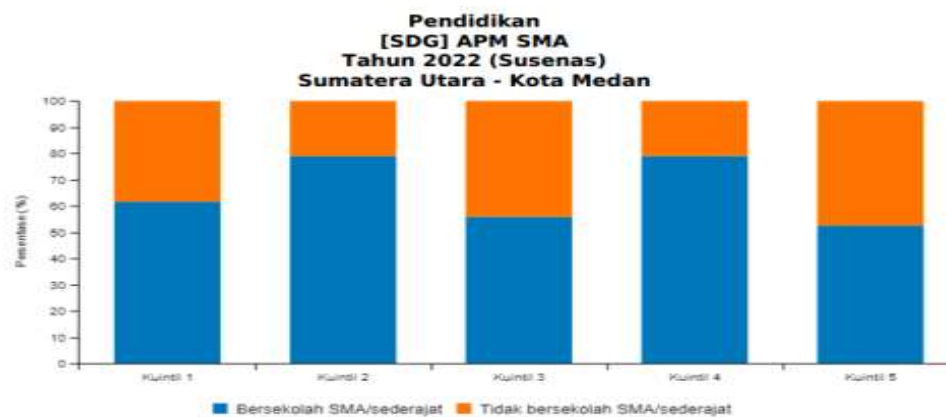
Rata-rata, pengeluaran per kapita penduduk Kota Medan mengalami pertumbuhan sebesar 2,39% . Namun, detail yang lebih spesifik menunjukkan bahwa sekitar 17,21% penduduk Kota Medan berada di bawah rata-rata tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pertumbuhan pengeluaran per kapita antara kelompok penduduk yang berpendapatan tinggi dan rendah. Penduduk 10% termiskin (desil 1) hanya mengalami pertumbuhan pengeluaran sebesar 3,42% , sedangkan penduduk 10% terkaya (desil 10) mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi, yaitu 5,44% Ketimpangan ini mencerminkan tantangan dalam pemerataan kesejahteraan di Kota Medan, di mana kelompok berpendapatan rendah tidak mendapatkan manfaat yang setara dari pertumbuhan ekonomi. Situasi ini menuntut perhatian lebih dari pemerintah untuk merancang kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan kelompok miskin dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut bisa meliputi program peningkatan keterampilan, akses pendidikan yang lebih baik, dan dukungan terhadap usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, Kota Medan dapat mencapai tujuan yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya..(Lubis, M. S., & Lubis, I. (2020).

Penduduk Menganggur Terbuka



Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

Tingkat kemiskinan terbuka di Kota Medan pada tahun 2022 tercatat sebesar 8,89% , mengalami penurunan sebesar 10,81% pada tahun sebelumnya, yang berarti jumlah penganggur terbuka berkurang sebanyak 1.787.442 orang . Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan akses, pelatihan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja baru mulai menghasilkan hasil. Meskipun demikian, laju penurunan kemiskinan terbuka pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan kemajuan dalam penanganan masalah ketenagakerjaan di daerah tersebut. Pemerintah Kota Medan juga melaksanakan berbagai program, termasuk bursa kerja mini dan pelatihan gratis untuk pencari kerja, guna lebih mengurangi angka kemiskinan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kota Medan dapat terus menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.



Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA merupakan salah satu indikator dalam pendidikan yang menunjukkan capaian paling rendah di antara indikator-indikator pendidikan lainnya, dengan nilai capaian sebesar 65,30% . Angka ini masih 26,30% di bawah target yang

ditetapkan dalam peraturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Hal ini patut menjadi perhatian lebih karena menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya terbatas pada masyarakat miskin, tetapi terdistribusi secara merata ke seluruh kelompok kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan



Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA merupakan salah satu indikator dalam pendidikan yang menunjukkan capaian paling rendah di antara indikator-indikator pendidikan lainnya, dengan nilai capaian sebesar 65,30% . Angka ini masih 26,30% di bawah target yang ditetapkan dalam peraturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Hal ini patut menjadi perhatian lebih karena menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya terbatas pada masyarakat miskin, tetapi terdistribusi secara merata ke seluruh kelompok kesejahteraan masyarakat. Dengan pencapaian yang masih rendah, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan menengah. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu berkolaborasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi peningkatan APM SMA, termasuk faktor-faktor ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

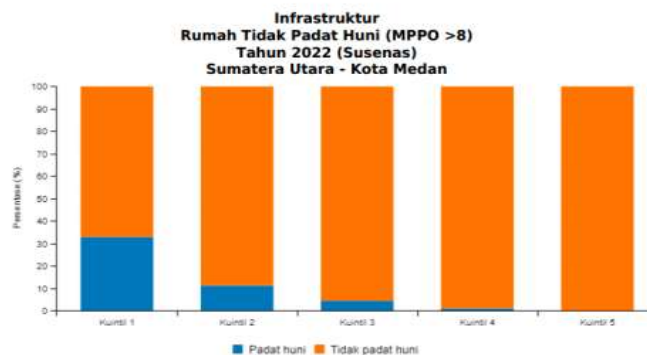
Pekerjaan



Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

Indikator Status Pekerjaan: Formal/Informal di Kota Medan menunjukkan pencapaian yang paling rendah, dengan nilai sebesar 38,10% . Angka ini mencerminkan adanya potensi ketimpangan dalam pasar kerja. Kebanyakan tenaga kerja di Kota Medan bekerja di sektor Jasa Masyarakat, Sosial, dan Personal , yang menunjukkan bahwa banyak pekerjaan yang tersedia adalah di sektor informal, yang berarti bahwa meskipun ada variasi dalam jenis pekerjaan, distribusi pendapatan di antara kelompok-kelompok tersebut tidak merata. Hal ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penting untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan memperluas akses ke pekerjaan formal agar dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan secara masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan produktif. Harefa, P. A. (2022).

Infrastruktur

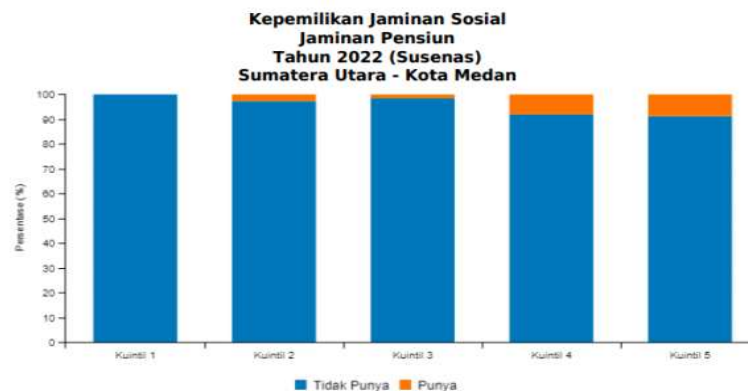


Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

dengan nilai capaian sebesar 8,10% . Indikator ini mengalami masalah ketimpangan yang signifikan, di mana penduduk 20% termiskin hanya mencapai capaian 66,99% , sementara penduduk 20% terkaya telah mencapai 100,00% . Hal ini menunjukkan bahwa kelompok

penduduk miskin harus diprioritaskan dalam upaya penyelesaian masalah perumahan yang layak. Ketimpangan ini mencerminkan tantangan besar dalam menyediakan perumahan yang terjangkau dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pencapaian indikator ini perlu difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas perumahan bagi kelompok yang berpendapatan rendah, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menetapkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengembangan perumahan sosial, agar semua masyarakat, terutama yang berada pada kelompok miskin, dapat memperoleh akses terhadap perumahan yang layak dan aman.

Kepemilikan Jaminan Sosial



Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

indikator dengan capaian paling rendah di antara indikator-indikator Perlindungan Sosial, dengan nilai capaian sebesar 4,70% . Hal ini mengalami masalah ketimpangan yang signifikan, di mana penduduk 20% termiskin hanya memiliki capaian 0,00% , sementara penduduk 20% terkaya sudah mencapai 8,66% . Hal ini menunjukkan bahwa kelompok penduduk miskin harus diprioritaskan dalam penyelesaian masalah terkait kepemilikan pensiun. Ketimpangan ini mencerminkan tantangan besar dalam memastikan perlindungan sosial yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan akses dan partisipasi dalam program yang dihentikan harus difokuskan pada kelompok yang berpendapatan rendah, agar mereka dapat memperoleh manfaat yang sama seperti kelompok yang berpendapatan tinggi. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menyusun kebijakan yang lebih inklusif dalam pengembangan sistem pensiun, termasuk program edukasi tentang pentingnya kepemilikan pensiun bagi kesejahteraan di masa tua. Dengan demikian, diharapkan semua masyarakat, terutama yang berada pada kelompok miskin, dapat terlindungi secara finansial saat memasuki masa pensiun.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012), ada dua alasan utama mengapa sulit untuk mengidentifikasi dan mengukur standar dan target kebijakan: pertama, bidang kebijakan terlalu luas dan tujuannya rumit; kedua, pernyataan ukuran dan tujuan dasar tidak jelas dan kontradiktif. Kebijakan implementasi dapat terganggu oleh interpretasi yang beragam dari para pelaksana atas ambiguitas ini. Sikap pelaksana terhadap standar dan tujuan juga penting; jika mereka tidak memahami atau tidak setuju dengan tujuan kebijakan, pelaksanaannya mungkin tidak berhasil. Memperjelas tujuan dan sasaran kebijakan, memberikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan kepada pelaksana, menggunakan terminologi yang seragam, dan melakukan penilaian secara berkala semuanya penting untuk keberhasilan implementasi. Diharapkan bahwa dengan mengambil tindakan ini, implementasi kebijakan akan berjalan lebih lancar dan berhasil, mencapai tujuan yang diinginkan. (Situmorang Chazali, A. (2020)

Aspek Sosial Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah mengurangi pengangguran. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah lowongan pekerjaan, maka akan terjadi pengangguran. Pemerintah Kota Medan berupaya untuk menurunkan angka pengangguran di kota tersebut dengan memberikan kemudahan bagi investor untuk mendapatkan izin menanamkan modalnya di kota tersebut. Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga membantu para pelaku UMKM dengan memberikan berbagai pelatihan, salah satunya pelatihan kewirausahaan. Untuk menanggulangi pengangguran di Kota Medan yang disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemerintah juga telah mengembangkan aplikasi Sistem Inovasi Ketenagakerjaan Terpadu (SIDUTA). Dengan memberikan kesempatan yang layak bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, maka dapat dilakukan upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. "Pemerintah Kota telah melakukan berbagai inovasi untuk menekan angka pengangguran di Kota Medan agar dapat teratasi," ungkapnyanya dalam wawancara dengan Muhammad Nashry terkait peran pemerintah dalam penanggulangan pengangguran. Misalnya, membantu UMKM dalam pengajuan SIDUTA, memberikan pelatihan ketenagakerjaan, dan mempermudah investor dalam mengakses perizinan. mengubah ruang-ruang yang kurang dimanfaatkan menjadi pusat perbelanjaan, dsb. Jika program ini terlaksana sesuai rencana, maka akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. (Wawancara 21 Maret 2023). Berdasarkan pandangan tersebut, pembangunan harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Menurunkan angka pengangguran melalui inisiatif-inisiatif yang dibuat oleh Pemerintah Kota Medan. Program ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan manfaat

dari kemajuan yang dihasilkan oleh pemerintah itu sendiri. Untuk meningkatkan kehidupan mereka, warga masyarakat harus memiliki keberanian untuk memulai dari awal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Republik Indonesia merupakan kepala Pemerintah Pusat dan dibantu oleh Wakil Presiden serta menteri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah otonom dan merupakan kepala daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus berpedoman pada desentralisasi, tugas pembantuan, dan fungsi formal pemerintahan.

E. Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Kemiskinan

Setiap masalah yang muncul di negara kepulauan ini ditangani oleh pemerintah dengan caranya sendiri yang unik, yang mungkin melibatkan penegakan hukum dan peraturan yang lebih ketat. Hampir setiap negara, terutama negara berkembang, berjuang melawan kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah serius yang perlu segera ditangani. Pembentukan negara dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi semua penduduknya, bukan hanya segelintir orang. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan nasional berupaya untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan adil yang merata secara material dan spiritual menurut Pancasila. (Sitompul, R. (2021)

Berdasarkan penjabaran tanggung jawab pemerintah tersebut, Pemerintah Kota Medan membuat dan melaksanakan peraturan daerah yang memuat program penanggulangan kemiskinan. Berikut ini adalah program penanggulangan kemiskinan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 No. 5 Tahun 2015:

- a. Bantuan pangan
- b. bantuan kesehatan
- c. bantuan pendidikan
- d. bantuan perumahan
- e. bantuan pengembangan keterampilan
- f. bantuan modal usaha
- g. bantuan perlindungan keamanan.

Selain itu, salah satu contohnya adalah "Penyebab kemiskinan menurut Hartomoand Aziz dalam Dadan Hudyana" (2009:2829) sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan rendah: Individu dengan tingkat pendidikan rendah mungkin tidak memiliki keterampilan hidup tertentu. Jika Anda kurang berpendidikan, Anda mungkin memiliki lebih sedikit kesempatan untuk memasuki dunia kerja.

2. Terlalu malas bekerja karena kemalasan dapat menyebabkan kurangnya motivasi dan sikap apatis terhadap tugas seseorang.
3. Sumber daya alam terbatas: Karena ketersediaannya yang terbatas, orang akan menjadi lebih miskin ketika sumber daya ini tidak dapat lagi digunakan sebagai sumber pendapatan.
4. Sedikit lowongan pekerjaan, Karena kurangnya pilihan pekerjaan, kemiskinan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Karena mereka tidak memiliki uang dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukannya, orang miskin cenderung tidak dapat menciptakan lapangan kerja baru. (Rahman, A. (2020).
5. Kekurangan modal: Orang miskin mungkin tidak mampu memperoleh peralatan dan perlengkapan yang mereka butuhkan atau memperoleh keterampilan baru yang akan membantu mereka menghasilkan uang.

Lebih lanjut, Suryadiningrat menegaskan bahwa penyebab utama kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat dalam menegakkan moral, keadilan, kebenaran, dan kejujuran bagi orang-orang yang beragama. Hal inilah yang merugikan masyarakat dan berdampak pada orang lain.

Salah satu komponen yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu negara adalah pemerintahannya. Meskipun rumusannya berbeda-beda di setiap negara, namun cara mencapai tujuan tersebut pada hakikatnya sama. Pembukaan Undang-Undang Dasar (ayat IV) menguraikan tujuan Republik Indonesia sendiri, yaitu: membela segenap bangsa Indonesia dan wilayahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan masyarakat, dan ikut serta dalam mewujudkan tatanan dunia yang berlandaskan pada keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian abadi.

F. Kemiskinan

Konsep kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensi. Misalnya, Ellis (1984:242-245) menunjukkan bahwa faktor ekonomi, politik, dan sosiopsikologis merupakan bagian dari dimensi kemiskinan. Secara ekonomi, kemiskinan adalah ketiadaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa angka kemiskinan ditentukan oleh jumlah rupiah yang dikonsumsi dalam bentuk makanan, yakni 2.100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditas yang dianggap mencerminkan pola konsumsi penduduk golongan bawah), serta konsumsi non-makanan (dari 45 jenis komoditas pangan yang berbeda sesuai kesepakatan nasional dan tidak terpisah antara pedesaan dan perkotaan).

Kepemilikan dan pendapatan yang rendah, atau lebih khusus lagi, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan, merupakan ciri-ciri

kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah rumit yang memengaruhi banyak segi kehidupan manusia. Bergantung pada sudut pandang dan keahlian penilai atau analis, gagasan abstrak tentang kemiskinan mungkin memiliki banyak definisi. Dengan semakin kompleksnya penyebab, indikator, dan masalah lain yang mendasarinya, definisi kemiskinan telah diperluas. Kemiskinan kini dilihat dari perspektif sosial, kesehatan, dan pendidikan di samping perspektif ekonomi. Beberapa definisi menggambarkan kondisi ketiadaan tersebut. Kondisi ketidakhadiran didefinisikan dalam sejumlah cara. Di antaranya adalah definisi kemiskinan menurut BPS, yang mendefinisikannya sebagai ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (BPS dan Depsos, 2005). Fakta bahwa begitu banyak orang, dan bahkan seluruh kelompok orang, memiliki indeks kesejahteraan di bawah rata-rata kebutuhan minimal yang relevan memunculkan istilah lain untuk kemiskinan ini pada awalnya. (Abdullah, M.Amin. (2018)

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang selalu menjadi perhatian utama bagi Indonesia. Karena kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, meluas, dan sulit diatasi, pembangunan berkelanjutan harus memprioritaskan penanggulangannya. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif untuk mengurangi kemiskinan sejauh ini. Kemiskinan dapat dihilangkan dengan sejumlah cara. Pertama, memenuhi kebutuhan keluarga dan kelompok yang kurang mampu di berbagai daerah. Kedua, mempersiapkan mereka untuk memimpin inisiatif untuk menghentikan penyebaran kemiskinan. Untuk mewujudkan nilai-nilai nasional masyarakat yang sejahtera dan adil, pengentasan kemiskinan kemudian dilaksanakan. Sepanjang sejarah Indonesia, kemiskinan tetap menjadi masalah. Jutaan anak tidak memperoleh akses ke pendidikan berkualitas tinggi karena kemiskinan, yang juga mempersulit pembayaran perawatan kesehatan dan kurangnya tabungan keuangan, investasi, dan kurangnya aksesibilitas layanan publik. lowongan kerja, keamanan keluarga dan jaminan sosial yang tidak memadai, dan urbanisasi yang berkembang. Jutaan orang terpaksa memenuhi kebutuhan dasar mereka akan sandang, pangan, dan papan dalam keadaan kemiskinan yang ekstrem. Kemiskinan merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Angka kemiskinan lebih tinggi di negara-negara berkembang dibandingkan di negara-negara industri. Menurut survei terkini, kemiskinan merupakan masalah masyarakat dunia yang paling mendesak jika dibandingkan dengan masalah lainnya. Begitu pula dengan kemiskinan yang belum teratasi di tanah air, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan.

Badan Pusat Statistik melaporkan persentase tersebut turun dari 9,01% pada Maret 2021 menjadi 8,49% pada September (BPS SU, 2021). Statistik ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kota Medan masih tergolong tinggi. Jutaan penduduk Medan hidup dalam

kemiskinan, sehingga masalah ini perlu segera diselesaikan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan seharusnya menjadi prioritas utama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional di Provinsi Sumatera Utara. Islam selama ini sering dikaitkan dengan kemiskinan. Islam sering digambarkan memiliki umat yang miskin, bahkan dikatakan bahwa kemiskinan merupakan akar penyebabnya. Faktor-faktor yang menghambat aspek masyarakat yang paling umum adalah kesejahteraan sosial, yaitu penyaluran bantuan yang tidak merata dan tidak tepat. Orang-orang yang paling membutuhkan bantuan seharusnya menerimanya, tetapi dalam praktiknya, sebagian orang yang sudah mampu secara finansial menerimanya. Karena kurangnya dukungan, mereka yang paling membutuhkan dibiarkan menggerutu. (Abdullah, M.Amin. (2018)

Di banyak negara berkembang, seperti Indonesia, kemiskinan merupakan isu utama dalam proses pembangunan. Menurut BPS (2021), jumlah keseluruhan penduduk miskin di Indonesia adalah 27,55 juta jiwa pada September 2020, naik 1,13 juta jiwa dari Maret 2020 dan 2,76 juta jiwa dari September 2019. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah yang memengaruhi semua orang dan dapat ditemukan di berbagai tempat. Kemiskinan merupakan masalah di masyarakat perkotaan dan pedesaan. Salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan adalah urbanisasi, atau perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Proses ini memperlambat pertumbuhan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan para pendatang baru membuat mereka sulit bersaing di pasar tenaga kerja, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya pengangguran dan peningkatan jumlah penduduk miskin secara keseluruhan. (Abdullah, M.Amin. (2018)

Seseorang dikatakan miskin jika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi dan mereka tidak dapat menikmati hidup dalam hal kesehatan, keyakinan agama, pendidikan, pekerjaan, pendapatan tinggi, dan tingkat kehidupan yang layak. Spiral kemiskinan ini biasanya memengaruhi negara-negara berkembang atau kurang berkembang. Sejumlah kekuatan siklus yang berinteraksi dan saling merespons disebut oleh Nurkse sebagai spiral kemiskinan. Begitulah, negara-negara miskin menjadi miskin. Orang-orang miskin, misalnya, cenderung makan lebih sedikit, yang menurunkan kesehatan mereka; mereka juga memiliki kemampuan kerja yang buruk, yang menurunkan pendapatan mereka, membuat mereka sangat miskin, dan akhirnya mereka tidak akan punya cukup uang untuk makan, dll.

6. KESIMPULAN

Pemerintah memegang peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Medan, khususnya melalui berbagai inisiatif dan kebijakan yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi utamanya adalah penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, di mana pemerintah mengutamakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan keterampilan. Program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH) membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk menyediakan akses terhadap layanan penting dan peluang ekonomi, pembangunan infrastruktur juga menjadi tujuan utama, khususnya di daerah pedesaan atau daerah tertinggal.

Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti sektor komersial dan kelompok nonpemerintah, untuk membangun ekosistem yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Tujuan dari pelatihan keterampilan adalah untuk membuat daerah berpendapatan rendah lebih kompetitif di pasar kerja. Namun, upaya Kota Medan untuk mengurangi kemiskinan terus menemui kendala, termasuk akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta masalah infrastruktur yang tidak tersebar merata di semua daerah. Oleh karena itu, agar lebih berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Medan, keberlanjutan inisiatif ini sangat bergantung pada kerja sama sektor publik, komersial, dan pemerintah.

7. DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Hasibuan, R. R. A., Kartika, A., Suwito, F. A., & Agustin, L. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 683-693.
- Andre Agasi, Peran Pemerintah dalam Pengetasan Kemiskinan di Kota Medan. Seminar Nasional LPPM UMMATUniversitas Muhammadiyah MataramMataram, 05 April 2023ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023pp. 247-252
- Arifah, W. A. D., Kurniawan, D., & Yusro, M. (2024). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(2), 67-77.
- Daulay, S. K. (2024). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kemiskinan di Kecamatan Medan Helvetia. *KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*, 3(1), 59-69.
- Devani Pratiwi, Sisiliana, Edy Suprayetno, Ulfah Setia Iswara, Dewi Mahrani Rangkut. Studi Kajian Tingkat Kemiskinan di Kota Medan. *Student Research Journal Vol.1, No.4 Agustus 2023* e-ISSN: 2964-3252; p-ISSN: 2964-3260, Hal 142-150 DOI:

<https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i3.502>

DUMASARI LUBIS. ANALISIS PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN

Harefa, P. A. (2022). Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal El-Thawalib*, 3(2), 363-374.

Lubis, M. S., & Lubis, I. (2020). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN DI KOTA MEDAN. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 5(2), 1-7.

Muhammad Ardian, Arief Marizki Purba. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK (STUDI PADA KECAMATAN MEDAN BELAWAN)

Mutiara Sari Lubis, Irsyad Lubis. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN DI KOTA MEDAN

Nasution, C., Sobri, K. M., & Najib, A. (2023). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 12(4), 1374-1388.

Nur, L., Tanjung, I. S., Pane, M. R., Hidayat, R., & Ulandari, S. (2022). Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 872-879.

Panjaitan, K. S., Khairunisah, K., & Jannah, N. (2023). Implementasi Zakat Maal secara Produktif, Solusi Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 1448-1459.

Popi Selviana Adella, Rafieqah Nalar Rizky. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)* Volume 3, Nomor 1, Juni 2023 ISSN 2807-6729

Qardhawi, Y. (dalam Nurul Huda). Pandangan Islam tentang Kemiskinan. *Jurnal Sosial dan Agama*, 10(1), 30-45.

Rahman, A. (2020). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Kota Medan . *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 145-162.

Sitompul, R. (2021). Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Perkotaan . *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 123-140.

Situmorang Chazali, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 15-28.

Zai, E., & Silviani, I. (2022). Peranan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat DI Kecamatan Medan Baru. *JURNAL GOVERNANCE OPINION*, 6(2), 90-97.